

## **DINAMIKA *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI GORONTALO**

Espin Tulie<sup>1</sup>, Asna Aneta<sup>2</sup>, Yanti Aneta<sup>3</sup>, Ismet Sulila<sup>4</sup>  
Universitas Negeri Gorontalo  
[espintulie071@gmail.com](mailto:espintulie071@gmail.com), [asnaatiek.aneta@ung.ac.id](mailto:asnaatiek.aneta@ung.ac.id),  
[yantianeta@ung.ac.id](mailto:yantianeta@ung.ac.id), [ismetsulila@ung.ac.id](mailto:ismetsulila@ung.ac.id)

### **ABSTRACT**

Penelitian ini menganalisis penerapan collaborative governance dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Gorontalo, khususnya penyelarasan antara Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, serta divalidasi dengan triangulasi dan FGD. Hasil penelitian menunjukkan tantangan berupa kurangnya koordinasi, desain kelembagaan yang lemah, dan pengaruh ego sektoral. Namun, harmoni kebijakan dapat dicapai melalui kepercayaan, transparansi, dan kolaborasi yang inklusif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan, kepemimpinan visioner, dan pelibatan publik untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif dan responsif. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik pemerintahan di Indonesia.

Kata Kunci: *Collaborative, Governance, Perencanaan, Pembangunan, Harmoni*

### **ABSTRACT**

*This study analyzes the application of collaborative governance in development planning in Gorontalo Province, especially the alignment between the DPRD's Main Ideas and the Regional Government Work Plan (RKPD). With a qualitative approach, data were obtained through interviews, observations, and document analysis, and validated by triangulation and FGD. The results of the study show challenges in the form of lack of coordination, weak institutional design, and the influence of sectoral egos. However, policy harmony can be achieved through trust, transparency, and inclusive collaboration. This study recommends institutional strengthening, visionary leadership, and public involvement to produce effective and responsive development planning. These findings contribute to the development of collaborative governance practices in Indonesia.*

Keywords: *Collaborative, Governance, Planning, Development, Harmony*

---

### **PENDAHULUAN**

Perencanaan pembangunan daerah adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan suatu wilayah. Proses ini tidak hanya menjadi alat untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara luas. Di Indonesia, perencanaan pembangunan daerah melibatkan berbagai pihak, terutama lembaga legislatif dan eksekutif, yang memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa kebijakan yang dirancang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam

konteks ini, salah satu mekanisme yang digunakan adalah Pokok-pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pokir merupakan dokumen penting yang dihasilkan melalui serangkaian kegiatan reses anggota DPRD, di mana masukan dari masyarakat di berbagai wilayah dihimpun untuk kemudian menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD sendiri adalah dokumen strategis tahunan yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, keberhasilan penyelarasan antara Pokir DPRD dan RKPD sangat menentukan efektivitas perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Proses penyelarasan ini, bagaimanapun, tidak selalu berjalan mulus. Tantangan yang dihadapi sering kali berasal dari perbedaan perspektif antara DPRD dan pemerintah daerah. Selain itu, dinamika politik lokal, ego sektoral, serta kurangnya koordinasi yang efektif menjadi faktor penghambat utama dalam menciptakan sinergi antara kedua dokumen strategis tersebut. Akibatnya, potensi terjadinya tumpang tindih program, perencanaan yang tidak selaras, hingga ketidakefisienan alokasi sumber daya menjadi semakin besar.

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menghadapi tantangan tersebut. Sebagai provinsi dengan berbagai potensi dan tantangan unik, Gorontalo memerlukan pendekatan yang inovatif dalam menyelaraskan Pokir DPRD dengan RKPD. Dinamika sosial, ekonomi, dan politik di provinsi ini menciptakan kebutuhan akan proses perencanaan yang tidak hanya partisipatif tetapi juga kolaboratif. Dalam hal ini, pendekatan tradisional yang bersifat top-down sering kali tidak mampu menjawab kebutuhan lokal secara efektif (Rozikin & Sofwani, 2023). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kerja sama antara berbagai pihak yang terlibat.

Salah satu pendekatan yang dianggap relevan untuk mengatasi permasalahan ini adalah *collaborative governance*. Konsep *collaborative governance* mengacu pada mekanisme di mana pemerintah bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik (Septiyanto et al., 2024). Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, *collaborative governance* dapat menjadi alat untuk menyelaraskan visi, misi, dan prioritas antara DPRD dan pemerintah daerah, sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

(Ansell & Gash, 2008) telah memberikan kontribusi penting dalam memahami konsep *collaborative governance* melalui identifikasi elemen-elemen kunci yang menjadi prasyarat keberhasilannya. Konsep ini menekankan pentingnya kerja sama yang terstruktur dan inklusif antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan kebijakan publik. Elemen-elemen ini tidak hanya relevan untuk konteks

umum, tetapi juga memiliki penerapan spesifik dalam proses penyelarasan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), khususnya di Provinsi Gorontalo.

Kondisi awal mencakup berbagai aspek yang memengaruhi hubungan antar-pihak sebelum kolaborasi dimulai. Elemen ini mencakup tingkat kepercayaan, sejarah hubungan kerja sama, dan dinamika kekuasaan antara aktor-aktor yang terlibat. Hubungan yang baik dan saling percaya menjadi dasar penting dalam menciptakan kolaborasi yang sukses (Douglas et al., 2020). Sebaliknya, jika ada konflik atau ketegangan di masa lalu, maka diperlukan upaya untuk memperbaiki hubungan tersebut sebelum kolaborasi dapat berjalan efektif. Dalam konteks penyelarasan Pokir dan RKPD, kondisi awal melibatkan hubungan antara DPRD sebagai lembaga legislatif dan pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif. Jika terdapat perbedaan visi, misi, atau kepentingan politik, maka dinamika ini dapat menghambat proses kolaborasi. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kondisi awal yang mendukung, seperti melalui dialog terbuka, membangun kepercayaan, dan mengidentifikasi kepentingan bersama. Adapun Desain kelembagaan mengacu pada struktur, aturan main, dan mekanisme kerja sama yang digunakan untuk mendukung proses kolaborasi. Elemen ini mencakup penetapan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, mekanisme pengambilan keputusan, serta alat-alat untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi. Desain kelembagaan yang baik harus mampu menciptakan kejelasan dan transparansi, sehingga tidak ada ambiguitas yang dapat menimbulkan konflik atau ketidakpastian. Dalam konteks Provinsi Gorontalo, desain kelembagaan harus memastikan bahwa proses penyelarasan antara Pokir DPRD dan RKPD dilakukan secara transparan dan partisipatif. Selain itu, desain ini harus mampu mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, sehingga proses perencanaan pembangunan menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal (Maulana & Dečman, 2023).

Kepemimpinan adalah elemen kunci dalam menciptakan iklim kolaborasi yang kondusif. Pemimpin yang inklusif dan visioner mampu mengarahkan proses kolaborasi ke arah yang konstruktif, sekaligus memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dihargai. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga memiliki visi jangka panjang untuk menciptakan kerja sama yang berkelanjutan. Dalam konteks penyelarasan Pokir DPRD dan RKPD, peran kepemimpinan sangat penting untuk mengatasi berbagai hambatan, seperti ego sektoral, kepentingan politik, atau ketidakseimbangan kekuasaan. Pemimpin yang baik harus mampu memediasi konflik, membangun konsensus, dan menciptakan rasa memiliki di antara semua pihak yang terlibat. Proses kolaborasi adalah inti dari *collaborative governance* (Olvera-Garcia & Sipe, 2019). Proses ini melibatkan interaksi yang konstruktif, berbasis dialog, dan berorientasi pada hasil. Dalam proses ini, semua pihak

harus memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangan, masukan, dan aspirasi mereka. Dialog yang terbuka dan transparan menjadi kunci untuk menciptakan pemahaman bersama dan membangun kepercayaan. Selain itu, proses kolaborasi juga harus memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas, sehingga setiap langkah yang diambil dapat dikaji dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan (Agustina & Wulandari, 2023). Dalam penyelarasan Pokir DPRD dan RKPD, proses kolaborasi harus mampu menjembatani perbedaan antara kedua dokumen strategis tersebut, sehingga menghasilkan rencana pembangunan yang lebih terintegrasi dan efektif (Bardach, 2012).

Elemen-elemen yang dijelaskan oleh Ansell dan Gash ini menjadi fondasi dalam menciptakan *collaborative governance* yang efektif. Dalam konteks Provinsi Gorontalo, penerapan elemen-elemen ini dapat memberikan solusi atas berbagai tantangan yang selama ini menghambat proses penyelarasan antara Pokir DPRD dan RKPD (Christensen, 2024). Dengan membangun kondisi awal yang mendukung, merancang desain kelembagaan yang inklusif, mengedepankan kepemimpinan yang visioner, dan menciptakan proses kolaborasi yang konstruktif, diharapkan perencanaan pembangunan di Provinsi Gorontalo dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam praktiknya, penerapan *collaborative governance* tidak hanya bertujuan untuk mengatasi perbedaan antara DPRD dan pemerintah daerah, tetapi juga untuk membuka ruang partisipasi bagi berbagai pihak. Pendekatan ini mendorong terwujudnya dialog yang konstruktif, di mana semua pihak dapat menyampaikan pandangan, masukan, dan aspirasinya secara setara. Dengan demikian, proses penyusunan perencanaan pembangunan menjadi lebih inklusif dan demokratis. Selain itu, *collaborative governance* juga memberikan kesempatan untuk memanfaatkan berbagai sumber daya, keahlian, dan jaringan yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan (Lestari et al., 2022). Namun, penerapan *collaborative governance* juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap perubahan, baik dari pihak DPRD maupun pemerintah daerah. Banyak pihak yang masih terjebak dalam pola pikir tradisional yang mengedepankan hierarki dan otoritas formal. Selain itu, adanya ego sektoral dan kepentingan politik sering kali menghambat terciptanya kerja sama yang harmonis (Agger & Sørensen, 2018). Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia untuk mengelola proses kolaborasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, termasuk melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas kelembagaan (Bettis et al., 2020).

Dalam konteks Provinsi Gorontalo, penerapan *collaborative governance* diharapkan dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang selama ini

menghambat penyelarasan antara Pokir DPRD dan RKPD. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan sinergi antara kedua dokumen strategis tersebut, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan secara keseluruhan (Hikmawan et al., 2020). Dengan pendekatan yang lebih kolaboratif, diharapkan perencanaan pembangunan di Provinsi Gorontalo dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, lebih efektif dalam mengalokasikan sumber daya, dan lebih berkelanjutan dalam jangka panjang (Donahue et al., 2011).

Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana elemen-elemen *collaborative governance* dapat diterapkan dalam konteks penyelarasan Pokir DPRD dan RKPD di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut, serta merumuskan rekomendasi praktis untuk mengatasinya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan teori dan praktik *collaborative governance* di Indonesia, khususnya dalam konteks perencanaan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, pendekatan *collaborative governance* menawarkan peluang besar untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Dengan mengedepankan kerja sama antara DPRD, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, pendekatan ini tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas perencanaan, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan publik. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memahami dan mengadopsi prinsip-prinsip *collaborative governance* dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan, sehingga tujuan pembangunan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan dapat tercapai.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam bagaimana proses *collaborative governance* diterapkan dalam menyelaraskan Pokir-pokir Pikiran (Pokir) DPRD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Provinsi Gorontalo. Metode kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena yang kompleks, terutama terkait dinamika hubungan antar-pihak, mekanisme kerja sama, dan hambatan yang muncul dalam proses kolaborasi (Fadli, 2021). Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, analisis, dan validasi data. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi langsung, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi nyata di lapangan, termasuk pola komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan perencanaan pembangunan antara DPRD dan pemerintah daerah. Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci, seperti anggota DPRD, pejabat pemerintah

daerah, serta pemangku kepentingan lainnya yang terlibat langsung dalam proses penyusunan Pokir dan RKPD. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka mengenai efektivitas collaborative governance.

Studi dokumentasi juga menjadi bagian penting dalam pengumpulan data, di mana berbagai dokumen strategis, seperti Pokir DPRD, RKPD, dan peraturan terkait, dianalisis untuk memahami kerangka kerja institusional dan mekanisme yang digunakan. Data dari dokumen ini memberikan landasan bagi analisis lebih lanjut terhadap kesesuaian antara Pokir DPRD dan RKPD. Untuk meningkatkan validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode dibandingkan satu sama lain untuk memastikan konsistensi dan keakuratan temuan. Selain itu, Focus Group Discussion (FGD) dilakukan sebagai sarana untuk mengkonfirmasi dan mendiskusikan hasil awal penelitian bersama para pemangku kepentingan. FGD ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi solusi dan rekomendasi yang relevan dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah.

Analisis data dilakukan secara sistematis menggunakan pendekatan tematik. Data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama yang sesuai dengan elemen-elemen collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. Selain itu, penelitian ini juga mengembangkan elemen tambahan, yaitu konsistensi, untuk menggambarkan pentingnya sinkronisasi, partisipasi publik, karakteristik, dan pengawasan dalam proses kolaborasi. Hasil analisis tematik ini kemudian diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian, mengidentifikasi hambatan utama, dan menyusun rekomendasi praktis yang dapat diterapkan di Provinsi Gorontalo. Dengan pendekatan yang holistik ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan konsep collaborative governance dalam konteks perencanaan pembangunan daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian *collaborative governance* yang menyesuaikan pokok-pokok pikiran DPRD dengan RKPD di Provinsi Gorontalo dapat menjelaskan beberapa aspek penting. Pertama, data yang dihasilkan menunjukkan bagaimana kerjasama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan DPRD dalam penyusunan RKPD, serta bagaimana pandangan dan aspirasi DPRD diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan tersebut. Selain itu, penjabaran data menekankan metode komunikasi dan koordinasi yang digunakan oleh kedua lembaga untuk memastikan konsistensi antara visi dan misi pemerintah dengan aspirasi yang dinyatakan oleh DPRD. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008), pembahasan ini akan diuraikan dalam konteks empat elemen utama, yaitu: (1) Kondisi Awal, yang mencakup latar belakang dan motivasi kerjasama; (2) Desain Kelembagaan, yang menyoroti struktur dan mekanisme

kolaborasi; (3) Kepemimpinan, yang mencakup peran pemimpin dalam memfasilitasi dan mengarahkan proses kolaboratif; dan (4) Proses Kolaboratif, yang menjelaskan dinamika interaksi, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah dalam kerangka kerja kolaboratif tersebut. Berikut akan dibahas berdasarkan pendapat ahli dan penelitian yang relevan untuk mendukung hasil penelitian terkait kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi di Provinsi Gorontalo.

Prinsip dasar kolaborasi pemerintah menekankan beberapa prinsip dasar seperti keterbukaan, tanggung jawab, berperan aktif, efektif efisien, kebersamaan dan tidak saling merugikan (Keban, 2004). Adapun interaksi aktor dimana dalam collaborative governance memerlukan interaksi antara aktor pemerintah (pusat, provinsi, daerah & aktor non pemerintah misalnya swasta, masyarakat, NGO, intelektual kependidikan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu tidak terlepas adanya hambatan dalam collaborative governance, (tata kelola kolaboratif) sering kali berasal dari berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas kolaborasi antara berbagai aktor (pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil) atau non pemerintah. Kolaborasi memerlukan peran penting dalam collaborative governance; a) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (kepercayaan masyarakat terhadap publik); b) mengembangkan strategi komunikasi yang baik (komunikasi publik dalam proses kebijakan sehingga mengurangi kesalah pahamana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat); c) mendorong kolaborasi eksternal, kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, swasta yang memberikan feedback pada masyarakat dan swasta; d) menggunakan teknologi yang berkualitas dalam hal penerapan e-government; dan e) membangun jaringan antar pemerintah atau lembaga.

### **Kondisi Awal**

Temuan Penelitian menunjukkan kondisi awal dalam *collaborative governance* di Provinsi Gorontalo menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perbaikan berkelanjutan dalam hal koordinasi, komunikasi, dan pengelolaan anggaran. Pengajuan kebutuhan masyarakat yang harus dilakukan jauh hari sebelumnya seringkali sulit diakomodasi tanpa mengganggu belanja publik yang sudah ada. Adapun kolaborasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan, termasuk integrasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) dan proses Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perlu ditingkatkan agar lebih sinkron dan terpadu. Pengelolaan aspirasi masyarakat dan sumber daya daerah harus lebih efektif dan berbasis data untuk memastikan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mengoptimalkan potensi lokal.

Adapun pengintegrasian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) masih belum optimal. Proses ini membutuhkan kolaborasi yang lebih erat antar pemangku kepentingan. Proses integrasi yang tidak sinkron

menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan jangka panjang dan implementasi di tingkat lokal, yang akhirnya berdampak pada ketidakmampuan daerah dalam mencapai target pembangunan. Selain itu, proses penganggaran melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) juga memerlukan peningkatan. Pengelolaan KUA- PPAS yang kurang terintegrasi dapat mengakibatkan perencanaan keuangan yang tidak selaras dengan kebijakan strategis daerah. Hal ini memicu masalah dalam pengalokasian anggaran yang seringkali tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat secara optimal.

Untuk memastikan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pengelolaan aspirasi dan sumber daya daerah harus lebih berbasis data. Pendekatan ini dapat membantu pemangku kepentingan dalam menyusun prioritas program yang lebih tepat sasaran dan mampu mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki oleh Provinsi Gorontalo. Komunikasi yang kurang baik antara berbagai pemangku kepentingan juga menjadi salah satu kendala utama. Kurangnya komunikasi yang terstruktur dan efektif dapat menyebabkan miskomunikasi dan ketidaksepahaman dalam menetapkan prioritas pembangunan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas implementasi program di lapangan.

Peran Pemerintah dalam Memfasilitasi Kerjasama, dimana Pemerintah sebagai fasilitator utama dalam proses *collaborative governance* memiliki peran penting untuk menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dan inklusif bagi semua pemangku kepentingan. Tanpa keterlibatan aktif pemerintah dalam memfasilitasi dialog ini, proses pengambilan keputusan akan cenderung bias dan kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat. Berikut Perlunya Peningkatan Kapasitas Pengelola Anggaran yakni Kapasitas pengelola anggaran di tingkat daerah juga perlu ditingkatkan agar mereka dapat menyusun rencana anggaran yang lebih akurat dan sesuai dengan realitas di lapangan. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengelola anggaran penting agar mereka dapat memahami dinamika anggaran secara lebih komprehensif.

Jika melihat Pengaruh Kondisi Awal terhadap Kolaborasi, Dalam konteks Gorontalo, kondisi awal yang penuh dengan tantangan ini mempengaruhi efektivitas kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Perlunya Penyesuaian dalam Perencanaan Anggaran, dimana terdapat kendala dalam pengelolaan anggaran juga dapat diatasi dengan melakukan penyesuaian dalam proses perencanaan anggaran, agar lebih fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan mendesak masyarakat tanpa mengorbankan belanja publik yang telah direncanakan sebelumnya. Kolaborasi yang bersifat berkelanjutan dan bukan hanya bersifat jangka pendek sangat penting untuk memastikan program-program pembangunan di Gorontalo dapat berjalan dengan lancar. Kolaborasi jangka panjang akan memungkinkan terjadinya evaluasi dan perbaikan terus-menerus, sehingga hasil yang diharapkan bisa lebih optimal.



Gambar 1. Wawancara bersama narasumber  
Sumber : dokumentasi Disertasi

Adapun Peran Data dalam Proses Pengambilan Keputusan, dimana Keberhasilan pengelolaan aspirasi dan sumber daya daerah sangat bergantung pada seberapa baik data yang tersedia dan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun program yang lebih tepat sasaran dan menghindari penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Berikut Kebutuhan akan Komitmen Pemangku Kepentingan, salah satu faktor kunci dalam keberhasilan collaborative governance di Gorontalo adalah komitmen dari semua pemangku kepentingan. Tanpa adanya komitmen yang kuat, proses kolaborasi akan sulit berjalan, dan hasil yang diharapkan akan sulit tercapai.

Keselarasan dalam Pengambilan keputusan yang didasarkan pada keselarasan nilai dan prioritas strategis antar pemangku kepentingan akan memperkuat kerja sama dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus memperkuat keselarasan ini. Adapun mengenai Rekomendasi untuk Memperkuat Kerjasama Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi yang dapat diberikan untuk memperkuat kerja sama di Gorontalo adalah dengan memperbaiki mekanisme

komunikasi, meningkatkan keterlibatan aktif semua pihak, serta memperkuat keselarasan nilai dan prioritas strategis antar pemangku kepentingan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas *collaborative governance* di Gorontalo, pembuat kebijakan dan praktisi perlu terus memperkuat koordinasi, komunikasi, dan pengelolaan anggaran. Pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika situasi awal, serta keselarasan nilai dan prioritas strategis antara pemangku kepentingan, sangat penting dalam memfasilitasi kerja sama yang efektif. Penguatan Tata Kelola yang Inklusif dengan memperkuat tata kelola yang inklusif dan berbasis data, diharapkan program-program pembangunan di Gorontalo dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memanfaatkan potensi lokal secara optimal.

Berdasarkan uraian hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi yang lemah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Tantangan komunikasi antara pemangku kepentingan mengindikasikan bahwa ketidak harmonisan antara kedua lembaga yang bertanggung jawab untuk pembangunan Gorontalo. Selain itu komunikasi menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh para elit politik dalam mencapai pembangunan yang berorientasi kepada kepentingan publik dan bukan untuk kepentingan individu atau sekelompok elit politik. Adapun pada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mengakomodasi aspirasi rakyat secara keseluruhan, disebabkan bertentangan dengan kepentingan politik dan kolaborasi yang tidak beriringan. Selanjutnya kapasitas oleh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam menjalankan tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan daerah Gorontalo dan khususnya dalam kolaborasi *government*.

### **Desain Kelembagaan**

Temuan Penelitian menunjukkan beberapa masalah utama dalam desain kelembagaan untuk mendukung tata kelola kolaboratif di Provinsi Gorontalo, termasuk ketidakjelasan prioritas pembangunan yang menyebabkan alokasi sumber daya tidak efisien, dan tata kelola kelembagaan yang kurang adaptif sehingga menghambat respons cepat terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Partisipasi stakeholder yang terbatas mengurangi akurasi representasi dalam pengambilan keputusan, serta kurangnya integrasi antara Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) dengan Rencana Strategis (Renstra) menyebabkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan visi jangka panjang pembangunan. Keterlibatan DPRD yang terbatas dalam kegiatan pembangunan dan pengawasan menghambat upaya untuk memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan budaya kerja yang kurang inklusif serta kolaboratif dalam organisasi menghambat efektivitas pencapaian tujuan pembangunan. Masalah-masalah ini mencerminkan tantangan yang perlu diatasi dalam desain kelembagaan untuk mendukung tata kelola kolaboratif di Provinsi Gorontalo.



Gambar 2. Wawancara bersama narasumber  
Sumber : dokumentasi Disertasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian teori, desain kelembagaan untuk mendukung tata kelola kolaboratif di Provinsi Gorontalo menghadapi beberapa masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, termasuk ketidakjelasan prioritas pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tindakan tata kelola yang kurang adaptif, partisipasi pemangku kepentingan yang terbatas, kurangnya integrasi antara Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) dengan Rencana Strategis (Renstra), serta budaya kerja yang kurang inklusif dan kolaboratif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Teori para ahli mendukung temuan ini dengan menekankan pentingnya desain kelembagaan yang meliputi aturan partisipasi yang jelas, transparansi, dan adaptabilitas, serta kepemimpinan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur Gorontalo yang seharusnya secara langsung dan proaktif untuk memastikan hasil inovasi kolaboratif itu sendiri. Oleh karena itu, perbaikan desain kelembagaan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo harus mencakup peningkatan kualitas kepemimpinan, aturan partisipasi yang jelas, transparansi, serta responsivitas terhadap perubahan untuk mencapai tata kelola kolaboratif yang efektif dan sinkronisasi dalam pembangunan tanpa

mengedepankan kepentingan masing- masing lembaga yang berdampak buruk pada keberlanjutan hidup masyarakat.

### **Kepemimpinan**

Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak efektif pada pemerintahan Provinsi Gorontalo, sehingga menyebabkan kegagalan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan dialog produktif untuk pembangunan daerah. Kurangnya keterpaduan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Tingkat Pembuat Anggaran Daerah (TAPD) serta pengawasan internal dan eksternal yang tidak optimal. Selain itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan yang lemah, dengan masalah seperti kurangnya koordinasi dan sinergi, komunikasi yang tidak efektif, serta pengambilan keputusan yang terfragmentasi, menghambat tercapainya tujuan bersama dan efektivitas pemerintahan serta pembangunan daerah. Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa diperlukan perbaikan signifikan dalam aspek kepemimpinan, keterpaduan antar lembaga, dan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan di Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kepemimpinan yang tidak efektif di pemerintahan Provinsi Gorontalo telah menyebabkan kegagalan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan dialog produktif untuk pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan yang signifikan dalam aspek kepemimpinan, keterpaduan antar lembaga, dan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan di Provinsi Gorontalo.

Mengacu pada hasil penelitian yang ada bahwasanya kepemimpinan antara lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Gorontalo belum menunjukkan sikap kerjasama atau belum melakukan kolaborasi dalam membangun Provinsi Gorontalo, kegagalan pembangunan terus terjadi sehingga berdampak buruk pada kemajuan daerah Gorontalo. Temuan penelitian juga sudah menguraikan kurangnya keterpaduan kelembagaan DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo, sehingga bentuk pengawasan yang perlu dilakukan oleh DPRD tidak optimal, sikap saling menghargai antar lembaga tidak mampu diciptakan dalam pembangunan, ego sektoral yang muncul dan sudah membudaya dikalangan pemerintah sendiri, sementara peran kepemimpinan sangat dibutuhkan untuk menaungi masing-masing kelembagaan dalam memperjuangkan kepentingan publik. *Collaborative governance* gagal diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo disebabkan adanya ego sektoral.

### **Proses Kolaborasi**

*Collaborative Governance* dalam Penyelarasan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Provinsi Gorontalo merupakan pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, DPRD, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non- pemerintah, dalam proses

pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Dalam konteks Provinsi Gorontalo, Collaborative Governance menjadi sangat penting dalam menyelaraskan Pikiran DPRD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pokir DPRD merupakan usulan program dan kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh anggota DPRD melalui reses dan dialog publik. Sementara itu, RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah yang memuat rencana program dan anggaran pembangunan. Proses penyelarasan antara Pokir DPRD dan RKPD menjadi kunci untuk memastikan bahwa program dan anggaran daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Melalui pendekatan *Collaborative Governance*, DPRD dan Pemerintah Daerah dapat membangun kolaborasi yang efektif dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan dalam *Collaborative Governance* antara DPRD dan RKPD, antara lain:

1. Komunikasi dan Koordinasi: Diperlukan komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat, menyusun prioritas pembangunan, dan mengalokasikan anggaran secara tepat.
2. Desain Kelembagaan: Struktur dan mekanisme kelembagaan harus mendukung proses kolaborasi, dengan aturan yang jelas mengenai peran, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan bersama.
3. Kepemimpinan: Kepemimpinan yang kuat dan fasilitatif dari DPRD dan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan untuk mengarahkan, memfasilitasi, dan mendorong kolaborasi yang efektif.
4. Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa Pokir dan RKPD benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Transparansi dan Akuntabilitas: Proses pengambilan keputusan, alokasi anggaran, dan implementasi program harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Collaborative Governance*, diharapkan Pokir DPRD dan RKPD Provinsi Gorontalo dapat saling menguatkan dan menghasilkan program pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi yang erat antara DPRD dan Pemerintah Daerah melalui pendekatan ini akan mendorong sinergi yang lebih baik dalam perencanaan, penganggaran, dan implementasi kebijakan publik di daerah.

Temuan penelitian mengungkapkan beberapa temuan penting terkait dengan hubungan antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Terdapat ketidaksesuaian visi antara kedua lembaga yang mencerminkan perbedaan pandangan jangka panjang, prioritas pembangunan, dan strategi pengelolaan sumber daya, yang

diperumit oleh faktor politik dan dinamika internal. Selain itu, ego sektoral dan kurangnya koordinasi efektif mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan tidak optimal dan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketidakjelasan arah dan tujuan kolaborasi, komunikasi yang tertutup, serta kurangnya pemantauan dan evaluasi juga menjadi tantangan utama yang menghambat kerjasama efektif. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembagian kewenangan dan keterlibatan DPRD dalam proses perencanaan memperburuk situasi, menunjukkan perlunya reformasi dalam operasi pemerintah daerah. Terakhir, kurangnya komunikasi efektif dan ketidaksesuaian tujuan antara DPRD dengan pemerintah provinsi, serta evaluasi dan monitoring program yang kurang intensif, mengakibatkan banyak program pembangunan tidak mencapai target yang ditetapkan.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penerapan collaborative governance dalam menyelaraskan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Provinsi Gorontalo. Proses kolaborasi yang melibatkan DPRD, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya memerlukan pemahaman mendalam tentang elemen-elemen kunci yang menjadi landasan keberhasilannya, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan yang inklusif, serta interaksi yang konstruktif dan berbasis dialog.

Penyelarasan antara Pokir DPRD dan RKPD tidak hanya mencerminkan sinergi antar-lembaga, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Provinsi Gorontalo, dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang unik menuntut pendekatan perencanaan yang lebih inovatif, partisipatif, dan kolaboratif. Collaborative governance menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada, termasuk ego sektoral, dinamika kekuasaan, serta perbedaan visi dan misi antar-pihak. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya harmoni antar-pihak, di mana semua aktor dapat menyumbangkan peran mereka secara optimal. Namun, penerapan collaborative governance tidak terlepas dari berbagai hambatan, seperti resistensi terhadap perubahan, kurangnya kapasitas kelembagaan, dan terbatasnya mekanisme koordinasi yang efektif. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi konsep ini memerlukan komitmen bersama, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta perancangan mekanisme yang mampu mendukung interaksi yang transparan dan inklusif. Dengan adanya harmoni dalam kerja sama, perencanaan pembangunan akan semakin mendekati prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan.

Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan wawasan praktis dan teoretis terkait bagaimana elemen-elemen collaborative governance dapat diadaptasi dalam konteks lokal untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Selain itu,

penelitian ini juga menawarkan rekomendasi yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan DPRD dalam menciptakan sinergi yang lebih baik, sehingga pembangunan yang direncanakan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan dampak yang berkelanjutan. Ke depan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi studi-studi berikutnya dalam mengeksplorasi penerapan collaborative governance, tidak hanya dalam konteks penyelarasan perencanaan pembangunan, tetapi juga dalam berbagai bidang kebijakan publik lainnya. Dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan, perencanaan pembangunan daerah dapat semakin mendekati prinsip keadilan, keberlanjutan, inklusivitas, dan harmoni sebagaimana menjadi tujuan utama dari pembangunan di Indonesia

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agger, A., & Sørensen, E. (2018). Managing Collaborative Innovation In Public Bureaucracies. *Planning Theory*, 17(1), 53–73.
- Agustina, W., & Wulandari, W. (2023). Collaborative Governance Dalam Meningkatkan Indeks Kebahagiaan Masyarakat (Index Of Happiness) Di Kota Bandung. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(3), 173–182.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance In Theory And Practice. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 18(4), 543–571.
- Bardach, E. (2012). *A Practical Guide For Policy Analysis: The Eightfold Path To More Effective Problem Solving*. CQ Press.
- Bettis, A., Schoon, M., & Blanchette, G. (2020). Enabling Regional Collaborative Governance For Sustainable Recreation On Public Lands: The Verde Front. . *Journal Of Environmental Planning And Management*, 1(1), 101–123.
- Christensen, I. (2024). Understanding Tradeoffs In The Institutional Design And Leadership Of Collaborative Governance. *Public Performance And Management Review*, 47(2), 263–290.
- Donahue, John D, & Richard J. Zeckhauser. (2011). *Collaborative Governance: Private Roles For Public Goals In Turbulent Times*. Princeton University Press.
- Douglas, S. C., Berthod, O., Groenleer, M., & Nederhand, J. (2020). Pathways To Collaborative Performance: Examining The Different Combinations Of Conditions Under Which Collaborations Are Successful. *Policy And Society*, 39(4), 638–658.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Hikmawan, M. D., Hamid, A., Nurrohman, B., Ramadhan, G., & Ma'asan Mayrudin, Y. (2020). Collaborative Governance Model On Agricultural Business In Banten, Indonesia. *Jurnal Transformative*, 6(2), 176–2021.

- Lestari, T., Rosyadi, S., & Tobirin, T. (2022). Collaborative Governance Dalam Pelayanan Publik. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 363–375.
- Maulana, R. Y., & Dečman, M. (2023). Collaborative Governance In The Digital Transformation Age: A Systematic Literature Review With Bibliometric Mapping. *Central European Public Administration Review*, 21(1), 31–60.
- Olvera-Garcia, J., & Sipe, N. (2019). Examining How Collaborative Governance Facilitates The Implementation Of Natural Resource Planning Policies: A Water Planning Policy Case From The Great Barrier Reef. *Environmental Policy And Governance*, 30(3), 115–127.
- Rozikin, M., & Sofwani, A. (2023). Joint Collaboration Of The Local Government (Regency, City, And Province) For The Successful Development In East Java Of Indonesia. *Journal Of Law And Sustainable Development*, 11(11).
- Septiyanto, A., Riyadi, B., & Saleh, C. (2024). Developing Policy And Regulation Using Collaborative Governance To Enhance Democratic Policing. *International Journal Of Religion*, 5(11), 742–760.